



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WILDON DJONI
2. Jabatan : PANITERA MUDA BANDING
3. NHK : 426618

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m²/36 m² di KOTA PADANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m²/124 m² di KOTA SOLOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 131.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 E AT (CKD) MINI BUS Tahun
2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, BAJAJ PULSAR 180 DTSI Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT NCIIBICAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ---

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.093.500.000

III. HUTANG Rp. 65.882.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.027.618.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.